Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VII
Minggu ke-3 Agustus
(14 s.d. 20 Agustus 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SUBSIDI LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2024

Juli Panglima Saragih
Analis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah menganggarkan subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun. Tetapi anggaran tersebut masih harus dibahas dengan DPR RI setelah RUU APBN Tahun Anggaran 2024 disampaikan Presiden ke DPR RI. Angka tersebut naik sebesar 7 persen dibandingkan *outlook* subsidi listrik di tahun 2023 yang berjumlah Rp70,8 triliun. Pemerintah juga merencanakan tidak menaikkan tarif listrik bersubsidi tahun 2024 mendatang, kecuali tarif listrik nonsubsidi yang akan naik. Sebagaimana diketahui, PT PLN (persero) siap menjalankan keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik pada periode triwulan pertama tahun 2023 (Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020). Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga daya 450-900 volt ampere (VA). Direktur Utama PT PLN (persero), Darmawan Prasodjo, menjelaskan PT PLN (persero) berkomitmen untuk bisa memasok listrik yang andal untuk mendorong perekonomian nasional. Apalagi, listrik yang andal merupakan jantung perekonomian nasional yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendorong daya saing industri. Oleh karena itu, PT PLN (persero) siap menjaga pasokan listrik tetap andal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Parameter penetapan tarif listrik ditentukan oleh realisasi parameter ekonomi makro pada triwulan keempat tahun lalu, yaitu kurs rupiah di angka Rp15.079,96 per dolar AS, *Indonesian Crude Price* (ICP) sebesar USD89,78 per barel, harga batubara acuan (HBA) sebesar Rp920,41 per kg, dan inflasi sebesar 0,28 persen.

Anggaran subsidi dan kompensasi BBM, gas LPG 3 Kg, dan listrik sebesar Rp329,9 triliun. Kenaikan subsidi listrik di tahun 2024 antara lain disebabkan oleh naiknya biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Penyebab kenaikan BPP antara lain adalah kenaikan *fuel mix* BBM dan peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *co-firing* pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2024 adalah untuk memberikan subsidi listrik kepada golongan yang berhak dan subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan (RTM-R).

Adapun besaran tarif tenaga listrik per Januari sampai Maret dan Juli sampai September Tahun 2023 sebagai berikut: (1) pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp415/kWh, (2) pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp605/kWh, (3) pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp1.352/kWh, (4) pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70/kWh, dan (5) pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 VA ke atas sebesar Rp1.699,53/kWh. Tarif listrik di atas berlaku juga untuk industri kecil, pelanggan sosial, RTM-R, bisnis kecil, dan termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Periode Juli-September tahun 2023, tarif listrik untuk sektor bisnis besar Golongan B-2/Tegangan Rendah (TR) daya 6.600 VA-200 kVA sebesar Rp1.444,70 per kWh dan Golongan B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA sebesar Rp1.114,74 per kWh. Sedangkan untuk sektor industri besar dengan Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA sebesar Rp1.114,74 per kWh dan Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas sebesar Rp996,74 per kWh.

Atensi DPR

Pemerintah menganggarkan subsidi listrik untuk RTM-R dan pelanggan kecil lainnya setiap tahun. Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah menganggarkan subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun. Implikasi dari subsidi listrik tersebut, tarif listrik untuk pelanggan RTM-R tidak naik tahun 2024. Sedangkan untuk pelaku usaha besar dan industri besar (nonsubsidi), tarifnya akan disesuaikan. Dengan adanya subsidi listrik, selisih (harga) tarif listrik antara pelanggan listrik 900 VA dengan 1.300 VA sangat jauh. Padahal, pelanggan listrik 1.300 VA relatif cukup banyak di Indonesia, terutama di provinsi yang jumlah angka kemiskinannya tinggi dan sangat tinggi. Di samping itu, pelaku UMKM juga banyak yang memakai listrik dengan daya 1.300 VA, karena dengan daya 900 VA tidak cukup untuk mendukung kegiatan usaha UMKM dan industri kecil. DPR RI perlu memperjuangkan penambahan subsidi listrik tahun 2024 agar tarif listrik untuk pelanggan daya 1.300 VA tidak naik.

Sumber

Kontan, 19 Agustus 2023;
liputan6.com, 17 Agustus 2023; dan
pln.co.id, 4 Januari 2023.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Mandala Harefa, Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Monika Suhayati
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023